

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA

Hario Abi Kusumo

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims at describing the management of funds allocation at Nupabomba village, Tanantovea district, Donggala regency. This research used qualitative descriptive method. The data were collected through observation, interview, and documentation. The five informants were taken through purposive sampling technique. The result show that the management of funds allocation at Nupabomba village, tanantovea district, Donggala regency was not optimal related to the some aspects that were examined: planning aspect has not reached the expected target, organization and movement aspects have reached the expected target, and the monitoring aspect has not reached the expected target.

Keywords: *Management, Planning, Organization, Movement, Monitoring*

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain.
2. pendapatan asli desa yang sah; bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit

10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, untuk pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 Bab III Pasal 3, Desa harus mempersiapkan:

1. Perencanaan ; Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
2. Pelaksanaan ; Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
3. Penatausahaan ; Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
4. Pelaporan ; Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

5. Pertanggungjawaban; Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

Manajemen

Secara etimologis, manajemen adalah kosa kata yang berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu yang berarti Seni melaksanakan atau mengatur. Sejuah ini memang belum ada kata yang mapan dan diterima secara universal sehingga pengertiannya untuk masing – masing para ahli memiliki banyak perbedaan.

Richard (2008 ; 5) mengungkapkan bahwa istilah manajemen berasal dari kata management (Bahasa Inggris), berasal dari kata “to manage” yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh Stoner (1997 ; 16) mendefenisikan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistemis untuk melakukan suatu pekerjaan.

Luther Gulick (Handoko, 2003 ;11) mendefenisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi pengetahuan. Artinya manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu – ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya.

McHugh (Sule dan Saefullah, 2010 ; 6), bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pengendalian orang – orang serta sumber daya organisasi lainnya.

George R. Terry dalam Nawawi (1997 ; 85) memberikan definisi: “Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Oleh Soetopo (2001 ; 14) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses kerjasama dengan dan melalui orang – orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Aspek – Aspek Manajemen

Secara umum manajemen juga dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Dalam hal ini manajemen dibedakan menjadi 3 bentuk karakteristik, antara lain adalah :

- a. Sebuah proses atau seri dari aktifitas yang berkelanjutan dan berhubungan.
- b. Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi.
- c. Mendapatkan hasil – hasil ini dengan bekerjasama dengan sejumlah orang dan memanfaatkan sumber – sumber yang dimiliki organisasi.

George R. Terry dalam Nawawi (1997;85) mengklasifikasikan fungsi - fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Planning (perencanaan).
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Actuating (Pengerakan)
4. Controlling (Perencanaan)

Konsep Pengelolaan

Pengertian pengelolaan merupakan istilah umum yang dipergunakan dalam ruang lingkup administrasi yaitu suatu cara yang mengatur dan mengendalikan suatu kegiatan. Secara etimologi, pengelolaan berasal dari kata “ Kelola “ yang dapat diartikan mengatur

segala sesuatu hal dengan sebaik - baiknya. Pengelolaan dapat juga berarti fungsi, yaitu cara mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut, pengelolaan menunjukkan penyelenggaraan dan sebagai subyeknya disebut pengelolah. Selanjutnya kata “ Kelola “ ini berkembang dalam berbagai variasi antara lain mengelolah berarti menyelenggarakan dan dikelola berarti dilaksanakan atau diselenggarakan.

Menurut Poerwardarminta (1985 ; 79), dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengatur dalam ruang lingkup pemerintahan, melakukan suatu pekerjaan, menyelenggarakan sesuatu usaha atau sejenisnya.

Kartasmita (1997 ; 21) memandang Pengelolaan sebagai suatu proses interaksi antara penentu tujuan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian pengelolaan menjadi jaringan yang mampu untuk mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan untuk menjadi hasil yang diinginkan. Karena itulah unsur yang saling terkait merupakan konsep penting dari pengelolaan.

Dalam uraian ini penulis akan mengemukakan pertarna fungsi menurut GR. Terry dalam Nawawi (1997 ; 85) :

a. *Planning* atau Perencanaan

Menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha, ditentukan dengan rencana kerja disusun, baik saat bila, maupun mengenai cara bagaimana usaha itu akan dikerjakan. Fungsi ini menghendaki dari seorang manajer suatu pandangan kedepan dengan tujuan yang terang.

b. *Organizing* atau menyusun

Setelah ditetapkan rencana maka kegiatan-kegiatan yang dipertujukan untuk mencapai itu dibagi-bagi antara anggota manajer dan bawahannya. Untuk itu pula diadakan penggolongan dengan tugas sendiri-sendiri dan masing masing

mendapatkan kekuasaan yang didelegasikan padanya dari atasannya.

c. *Actuating* atau menggerakkan

Untuk metaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas - aktivitas tersebut maka manajer mengambil tindakan-tindakan ke arah itu. Tindakan-tindakan itu disebut kepemimpinan, perintah, instruksi, komunikasi, dan nasehat dengan tujuan menggerakkan seseorang untuk beraksi.

d. *Controlling* atau pengawasan

Manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek terhadap apa yang dilakukan, guna memastikan pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan itu. Mungkin pula perbedaan - perbedaan tunggakan dalam pekerjaan, kesalahpahaman di dalam melakukan tugas atau halangan yang tiba-tiba muncul. Sernua itu harus segera diketahuinya.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.

Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut

Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa/rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Silalahi (2009 ; 28) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang suatu situasi, setting sosial, atau hubungan. Pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Prastowo (2012;22) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Satori dan Komariah (2012:22) Mendefinisikan Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan peneliitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata –kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Makna yang terkandung dalam pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui implementasi di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu gejala, baik pengamatan langsung melalui informasi maupun dengan mempelajari data-data untuk dapat menjawab pertanyaan.

Adapun Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. Dengan Alasan bahwa Desa Nupabomba merupakan salah satu desa yang mendapatkan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Donggala. Dengan Waktu yang dibutuhkan oleh calon Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini sekitar 3 Bulan.

Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

Dalam penelitian ini menggunakan Tehnik Purposive dalam penentuan informan yang terdiri dari :

- a. Birokrasi yang menangani pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- b. Kepala Desa
- c. Sekretaris Desa
- d. Badan Perwakilan Desa (BPD)
- e. Serta Kaur. Keuangan desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea.

Jenis & Sumber Data

Data Sekunder: Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik,

majalah, keterangan keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumentasi, yaitu berusaha menghimpun, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber penelitian yang dapat berupa laporan, buku-buku, pedoman dan peraturan pelaksanaan program serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan data-data tentang Program Alokasi Dana Desa (ADD). Data tersebut akan mendukung dan melengkapi analisis data yang didapat dari hasil wawancara maupun dari observasi.

Data Primer: Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data: Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan teknik *Triangulasi* artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Adapun teknik pengumpulan data nya yaitu :

1. Observasi.

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses-proses yang dilakukan di lapangan. Pengamatan langsung dilakukan secara *participant observer*.

2. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam yang dilakukan dengan pertanyaan yang “*open-ended*” dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat untuk menjadi dasar penelitian lebih jauh.

3. Dokumentasi

Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian ini, karena sasaran kajian penelitian kualitatif ini mengarah pada latar belakang peristiwa yang telah terjadi atau telah dilaksanakan yang

berkaitan dengan atau peristiwa dan kondisi sekarang atau yang akan datang. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat/menyalin dan melalui fotocopy data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian.

Instrumen Penelitian: Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Reduksi Data (pengurangan data)

Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik.

2) Display data (penyajian data)

Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap.

3) Menarik kesimpulan/verifikasi

Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Nupabomba pada awalnya terdiri dari Nupa kodi artinya kampung kecil dan Nupa oge atau kampung besar. Nupa kodi dan

Nupa Oge sekarang terletak di sebelah utara Dusun V Kebun Kopi. Desa Nupabomba yang dulunya masih disebut kampung, berdiri pada tahun 1938 dan sekarang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bpk. Sardjan Tole.

Nama Nupabomba terdiri dari dua suku kata yaitu: Nupa berarti wilayah, tempat pemukiman sedangkan Bomba adalah sejenis kayu yang cukup banyak tumbuh di sekitar kawasan ini. Jadi Nupabomba berarti tempat pemukiman atau wilayah/kawasan dimana terdapat pohon bomba yang jarang tumbuh pada tempat-tempat lain. Kekhususan iniah sehingga masyarakat setempat pada saat itu memberi nama wilayah ini dengan Nupabomba untuk mengabadikan tempat ini sebagai tumbuhnya pohon bomba yang sampai saat ini mulai punah.

Asal mula masyarakat Desa Nupabomba berasal dari Rano Malei yaitu suatu pemukiman masyarakat yang berada di atas gunung yang diperkirakan berada di sebelah utara Kebun Kopi sekarang. Konon kabarnya Rano Malei inilah asal mula manusia yang mendiami Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara. Menurut penuturan masyarakat setempat wilayah Nupabomba saat ini merupakan wilayah yang pertama tempat turunnya masyarakat dari Rano Malei. Lalu menyebar ke seluruh pemukiman-pemukiman yang ada saat ini, seperti Boya Peramba (Bomba), Kungguma (Labuan), Nupa Kodi (Nupabomba) Nupa Oge (Nupabomba) Kumbili (Kayumalue), Vatutela (Tondo) dan Andudana (Baiya).

Menurut keadaan geografis, Desa Nupabomba merupakan salah satu desa yang cukup strategis, karena menghubungkan Kabupaten Donggala dan Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Mautong, bahkan merupakan jalan utama Trans Sulawesi yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Selatan. Dilihat dari geografisnya Desa Nupabomba memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wombo

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kayumalue Ngapa
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lambara
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Toboli kec. Parigi Mautong

Menurut keadaan demografisnya, Desa Nupabomba memiliki luas wilayah $\pm 105,45$ km². Pertumbuhan Penduduk Desa Nupabomba cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2013, Penduduk Desa Nupabomba tercatat 3011 jiwa (759 KK), 1583 jiwa diantaranya adalah laki-laki dan 1428 jiwa perempuan.

Visi Pemerintahan Desa Nupabomba yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Desa Nupabomba Yang Aman, Tertib Dan Berkualitas Berbasis Pada Sumber Daya Manusia Yang Handal, Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Desa maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai untuk pemerintah desa misi ini memberikan arah dan pedoman jangka Menengah serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan, program kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2020)

Misi Pemerintahan Desa dirumuskan atau ditetapkan sebagai berikut :

1. Menciptakan Keamanan dan ketertiban melalui peran serta aktif masyarakat
2. Meningkatkan daya saing desa melalui peningkatan produktifitas lahan
3. pertanian dan perkebunan
4. Revitalisasi fungsi dan peran pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan
5. dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
6. Peningkatan Infrastruktur Desa berbasis kebutuhan Masyarakat dan Potensi Desa
7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Life Skill

8. Peningkatan derajat kesehatan dengan mengedepankan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

9. Pengelolaan Hutan dan sungai secara efektif dan efisien serta berwawasan Lingkungan.

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala, peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama : Perencanaan , Pengorganisasian, Pengerakan, dan Pengawasan , sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Goerge R. Terry (Nawawi 1997:85)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala, dengan melihat 4 aspek diatas, dengan melakukan wawancara melibatkan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah – masalah yang diteliti. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari: Unsur dari Birokrasi yang menangani ADD di Kab. Donggala, Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintan Desa Nopabomba.

Setiap informan dilakukan identifikasi untuk mengenal lebih dekat masing – masing informan untuk memahami setiap karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti. Peneliti lebih mengfokuskan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala, dengan melihat 4 aspek pada pengelolaan program, yaitu:

Perencanaan

Fungsi perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan tentang apa yang ingin dicapai, pemberian pedoman, persiapan pelaksanaan, dan garis – garis besar yang akan dituju. Sehingga indikatornya adalah *Partisipasi* dan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*

Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec.

Tanantovea Kabupaten Donggala sudah memiliki perencanaan yang jelas dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Zainudin S,ST, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Donggala, yang mengemukakan bahwa :

“Di Kabupaten Donggala, semua desa diwajibkan dalam melakukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), mesti melibatkan semua elemen masyarakat Desa, hal ini sesuai dengan petunjuk teknis program Alokasi Dana Desa (ADD).” (Wawancara, 7 Januari 2016)

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Donggala sudah mengingatkan agar dalam perencanaan ADD mesti melibatkan berbagai stakeholder yang ada di Desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan ADD sangat penting guna meningkatkan kualitas perencanaan suatu kegiatan di Desa.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kartasasmita (1997 ; 21) memandang Pengelolaan sebagai suatu proses interaksi antara penentu tujuan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian pengelolaan menjadi jaringan yang mampu untuk mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan untuk menjadi hasil yang diinginkan.

Mengenai Standar Operasioanl Prosedur Zainudin S,ST, M.Si mengungkapkan bahwa :

“sudah ada petunjuk teknis pengelolaan dana ADD yang dibagikan disetiap Desa, agar kepala – kepala desa bisa bekerja secara lebih transparan.” (Wawancara, 7 Januari 2016)

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Nupabomba sudah baik, karena pihak sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disosialisasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Donggala, guna mendukung pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di seluruh Desa di Kab. Donggala. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, ketersediaan standar operasional prosedur merupakan salah satu komponen penting yang harus ada di setiap desa.

Perencanaan sebagai salah satu unsur manajemen, hal ini sesuai dengan ungkapan Luther Gulick (Handoko, 2003 ;11) yang mendefenisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi pengetahuan.

Pengorganisasian

Pengorganisasi merupakan proses kegiatan pengelompokan orang – orang, alat – alat, tugas – tugas dan tanggung jawab serta wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sehingga indikatornya yaitu *Sumber Daya* dan *Koordinasi*.

Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala sudah memiliki aspek pengorganisasian yang baik, dapat dilihat bawah ini yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Sardjan Tole sebagai Kepala Desa Nupabomba, yang mengungkapkan bahwa:

“perangkat kami yang ada di Desa Nupabomba sudah memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan program ADD, begitu pula dengan perangkat pendukung lainnya seperti Komputer sudah tersedia dalam merangkum berbagai pertanggungjawaban kegiatan dana ADD ” (Wawancara, 15 Januari 2016)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam aspek pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba sudah baik, karena didukung oleh sumber daya manusia yang sudah cukup paham dalam pengelolaan ADD, serta perangkat keras teknologi sudah tersedia dalam merangkum berbagai kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kab. Donggala. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya teknologi yang memadai, bisa memperlancar pengelolaan dana ADD di Desa Nupabomba.

Salah satu pembeda antara era modern dengan era tradisional, dilihat dari perangkat teknologi yang menjadi daya dukung pelaksanaan suatu program pemerintah. Perangkat teknologi yang lengkap, akan memudahkan berbagai program pembangunan dijalankan sesuai dengan yang telah diatur dan direncanakan. Hal ini sudah merupakan kehendak zaman yang tidak bisa kita abaikan guna memperkuat pembangunan bangsa dan daerah.

Mengenai Koordinasi Pengelolaan, Sardjan Tole mengungkapkan bahwa:

“secara Horizontal, kami sudah berkoordinasi dengan semua unsur masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka, serta untuk menyukseskan pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD. Secara Vertikal, kami selalu meminta petunjuk kepada BPMPD jika kami mengalami kendala – kendala.” (Wawancara, 15 Januari 2016)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam aspek pengorganisasian program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba sudah baik, unsur Pemerintah Desa sudah melakukan koordinasi, baik koordinasi Horizontal dengan elemen masyarakat, maupun koordinasi vertikal dengan BPMPD Kab. Donggala. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program, sangat ditentukan sejauh mana tingkat komunikasi dan koordinasi lintas instansi maupun lintas kepentingan di masyarakat, sehingga tidak timbul riak – riak

yang akan mengakibatkan masalah di kemudian hari.

Dalam program Pemerintah yang sifatnya Bottom Up, ada banyak unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, sehingga para pengelola program memiliki hubungan yang erat dengan unsur pemerintah di atasnya yang sifatnya vertikal, dengan sasaran program yang sifatnya horizontal. Komunikasi yang efektif akan membuat sebuah program akan berjalan dengan sedikit dinamis dan mudah dipecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Pengerakan

Pengerakan berarti mengerakkan orang – orang dalam organisasi supaya mau bertindak atau mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengerakkan berhubungan dengan pemberian motif kerja dari pimpinan kepada bawahan untuk bekerja. Oleh karena itu, pimpinan dikatakan sebagai motivator bagi bawahannya untuk bekerja dengan baik. Dengan Indikatornya adalah *Kerjasama* dan *Motivasi dari Pimpinan*.

Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala sudah memiliki Pengerakan yang jelas dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang Muh. Ayub sebagai Sekretaris Desa Nupabomba, yang mengungkapkan bahwa :

“kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola program yang di biayai oleh ADD, banyak masyarakat yang kami libatkan.” (Wawancara, 15 Januari 2016)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam aspek kerjasama dalam pengelolaan program yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba sudah baik, masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan progra,. Hal ini juga menunjukkan bahwa kerjasama dengan masyarakat merupakan salah satu kekuatan dalam tercapainya pelaksanaan suatu program.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Handyaningrat (1984;36) mengemukakan

bahwa manajemen dipandang sebagai suatu sistem, yaitu suatu kerangka kerja yang terjadi dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling terkait yang diorganisasi sedemikian rupa dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Mengenai Motivasi Pimpinan, Muh. Ayub mengungkapkan bahwa :

“ kami selalu mendapat motivasi dari Kepala Desa untuk benar – benar menggunakan dana ADD sesuai dengan aturan dan sesuai dengan program yang telah disepakati.” (Wawancara, 15 Januari 2016)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam aspek motivasi pimpinan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba sudah baik, karena aparat Desa sudah selalu mendapat motivasi dari pimpinan desa untuk bekerja sesuai dengan aturan dan program yang sudah ditentukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan program yang dibiayai oleh ADD sudah sesuai dengan arahan dari Pimpinan Desa Nupabomba.

Hal ini menunjukkan bahwa pengerakkan berhubungan dengan pemberian motif kerja dari pimpinan kepada bawahan untuk bekerja. Oleh karena itu, pimpinan dikatakan sebagai motivator bagi bawahannya untuk bekerja dengan baik.

Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi diatas dan mengambil tindakan – tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Dengan indikatornya adalah *Supervisi dan Pelaporan*.

Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kabupaten Donggala sudah memiliki pengawasan yang baik, dapat dilihat bawah ini yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Anwar M.Poli sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Nupabomba, yang mengungkapkan bahwa:

“secara tidak langsung kami selaku perwakilan masyarakat, juga melakukan pengawasan kepada para pengelola dan pelaksana program yang dibiayai oleh ADD, dan hasilnya kami sampaikan secara terbuka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Donggala.” (Wawancara, 29 Januari 2016)“

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam aspek pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba sudah baik, karena pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) juga melakukan pengawasan secara tidak langsung, sehingga hasilnya juga bisa menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Desa Nupabomba dan Pemerintah Kabupaten Donggala yang dalam hal ini pihak BPMPD. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD sudah diawasi oleh organ Pemerintahan Desa, salah satunya Badan Perwakilan Desa (BPD).

Sebagai salah satu organ controlling di tingkat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Nupabomba merupakan pihak yang paling dekat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan perwujudan dari tanggungjawab keterwakilan masyarakat desa yang banyak. BPD Desa Nupabomba melakukan pengawasan secara empiris, sehingga akan mudah menemukan berbagai masalah dilapangan yang menjadi problematika pengelolaan ADD.

Mengenai Supervisi, Anwar M. Poli mengungkapkan bahwa :

“setahu saya, ada beberapa kami kami menghadiri undangan dari Pemerintah Desa Nupabomba, untuk mendengarkan pengarahan dari BPMPD.” (Wawancara, 29 Januari 2016)“

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa dalam aspek supervisi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba sudah baik, karena pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Donggala, pernah melaksanakan pengarahan/supervisi program Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Nupabomba. Hal ini menunjukkan bahwa

untuk memantapkan pelaksanaan suatu program, supervisi rutin sangat diperlukan.

Supervisi merupakan penguatan akan suatu program yang akan atau sedang dijalankan oleh Pemerintah. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba, Badan Perwakilan Desa (BPD) bisa menjadi pihak yang bersifat aktif maupun pasif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam petunjuk teknis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa : *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala Belum Optimal*, karena beberapa aspek yang dikaji, yaitu dari 1) aspek perencanaan belum baik, karena masih belum tercipta partisipasi dari elemen masyarakat, 2) aspek pengorganisasian sudah baik, dari sudah memiliki sumber daya pelaksana program yang memadai, 3) aspek pengerakan sudah baik, karena kerjasama antara pengelolah dengan masyarakat pelaksanaan sudah optimal, 4) aspek pengawasan sudah baik, karena dari deminesi supervisi dan pengawasan sudah dilakukan dengan baik.

Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukan beberapa hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala, oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu antara lain perlunya partisipasi penuh dan kerjasama antara masyarakat sebagai objek dan Pemerintah Desa sebagai Subjek pengelolah dana AD, serta pengawasan yang lebih intensif, sehingga pelaporan bisa selesai tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yaitu Dr. Hj. Mustainah, M,Si dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. BPFE. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Handayaniingrat, Suwarno. 1984. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1977. *Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis Yang Kompetitif*. Erlangga . Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Alokasi dana desa
- Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa.
- Poerwardarminta, W J S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Richard, L. Daft. 2008. *Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta
- Satori dan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Silalahi. Urbar. 2009. *Metode Penenlitian Sosial*, Rafika Aditama. Bandung.
- Soetopo, 2001. *Administrasi, Manajemen dan Organisasi*. Bumi Aksara . Jakarta.
- Stoner, James. A.F. 1997. *Manajemen*, Jilid I. PT. Prenhallindo. Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alpha Betha. Bandung.
- _____, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alpha Betha. Bandung.

Sule, Ernie Tisnawati & Saefullah, Kurniawan.
2010. Pengantar Manajemen Edisi 2.
Prenada Media Group. Jakarta.

Wasistiono. Sadu. 2006. *Keuangan
Pembangunan Desa Tertinggal*. Gunung
Agung. Jakarta.